

# **BERTEMPOER ATAU BEROENDING: TANGGAPAN PERS DI JAWA PADA MASA AWAL REVOLUSI INDONESIA**

**Andi Suwirta \*)**

## **ABSTRACT**

*One of crucial political issues in the beginning of Indonesian revolution was to decide whether the independence would be maintained through fighting or negotiating. Press, in this case newspaper, and other forces – including military – had taken part in the argument. This had led the Indonesian revolution to internal conflicts which were dynamic. No matter how tenacious the government was in arguing that diplomacy was the best way to save the revolution, voices preferring battle did exist as an expression of democracy in Indonesia.*

**Key words:** *options for fighting or negotiating, dynamic of internal revolution, and freedom of democracy in Indonesia.*

---

\*)**Drs. Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Dosen dan Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, 2001-2007. Dilahirkan di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 9 Oktober 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (Drs.) di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung tahun 1989; dan pendidikan S-2 (M.Hum) di Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana UI (Universitas Indonesia) Jakarta tahun 1996, dengan menulis tesis – yang kemudian diterbitkan – tentang *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), 1945-1947* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000). Menulis beberapa buku, di antaranya adalah *Tasawuf dan Proses Islamisasi di Indonesia* (Bandung: Historia Utama Press, 2002). Untuk kepentingan akademis, Drs. Andi Suwirta, M.Hum. dapat dihubungi dengan alamat rumah: Komp. Vijaya Kusuma B11 No.15-16 Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat 40164. Tlp.(022) 7837741 atau e-mail: [andisuwirta@yahoo.com](mailto:andisuwirta@yahoo.com)

## Pengantar<sup>1</sup>

Salah satu isu politik penting pada masa awal revolusi Indonesia adalah: apakah usaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu akan dilakukan dengan cara bertempur atau berunding. Pers yang lahir di tengah-tengah revolusi, juga tidak luput dari pengaruh isu politik itu. Sebagaimana akan diperlihatkan nanti, pers memang tidak hanya menyajikan tentang berita (*news*) tetapi juga memberikan pandangan-pandangan (*views*) terhadap kejadian yang dinilai penting selama revolusi. Pandangan, sikap, dan pendirian pers itu nampak jelas apabila kita melakukan analisa isi (*content analysis*), tidak hanya pada sajian berita utama tetapi juga tajuk rencana, pojok, motto, atau karikatur yang disajikan pers pada waktu itu.

Tulisan ini akan membahas tentang pers, terutama surat kabar, yang terbit pada masa awal revolusi di Jawa. Pembahasan akan difokuskan pada tiga surat kabar, yaitu *Berita Indonesia* (Jakarta), *Warta Indonesia* (Semarang), dan *Lasjkar* (Solo). Pemilihan pada surat-surat kabar itu dilakukan secara acak mengingat waktu penelitian yang terbatas, dengan pertimbangan bahwa dua surat kabar yang disebut pertama berada di daerah pendudukan tentara Sekutu (Inggris dan Belanda), sedangkan surat kabar yang terakhir berada di daerah Republik. Adapun waktu yang dibahas mulai bulan Oktober 1945 sampai dengan bulan Juli 1946, dengan alasan pada masa 10 bulan itulah revolusi Indonesia mengalami, meminjam istilahnya Kahin,<sup>2</sup> "*the internal politics of the revolution*", terutama ketika dihadapkan pada pilihan cara mempertahankan kemerdekaan dan kemana arus revolusi akan diarahkan.

---

<sup>1</sup>Tulisan ini, sebelum diperbaiki seperlunya seperti sekarang, pernah disajikan dan didiskusikan dalam Diskusi Sejarah Kemerdekaan di Tingkat Lokal, yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah FS-UNDIP Semarang di Bandungan, Jawa Tengah, pada tahun 1994; dan pernah dimuat dalam Zulfikar Ghazali (ed.), *Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi* (Jakarta: Proyek IDSND Depdikbud, 1995), hlm.62-87.

<sup>2</sup>George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (New York, Ithaca: Cornell University Press, 1970), hlm.147-212.

## Revolusi Kemerdekaan dan Kelahiran Pers

Ambruknya regim militer Jepang yang otoriter dan represif di Indonesia pada pertengahan bulan Agustus 1945, telah melahirkan dislokasi sosial. Kekuatan-kekuatan terpendam dan bersifat revolusioner dari masyarakat pada waktu itu, mencuat ke permukaan dan mengalir laksana air bah yang dahsyat. Arus revolusi, dengan demikian, telah dimulai dan sepertinya sulit untuk dikendalikan.<sup>3</sup> Dalam suasana yang seperti itulah pers republik dilahirkan, dengan maksud – selain untuk memberikan penerangan – mengkoordinasikan hasrat besar dari rakyat yang ingin lepas-bebas-merdeka di satu sisi, dan visi dari para pemimpin bangsa tentang bentuk kemerdekaan yang dicita-citakan di sisi lain.<sup>4</sup>

Kira-kira sebulan setengah setelah proklamasi kemerdekaan, surat-suratkabar resmi yang semula milik Jepang diambil alih dan diubah menjadi suratkabar “milik Repoeblik”. Pengambilalihan itu biasanya dilakukan oleh para pemuda yang berjiwa nasionalis, revolusioner, dan punya pengalaman di bidang jurnalistik. Begitulah, misalnya, suratkabar *Asia Raya* di Jakarta, *Tjahaja* di Bandung, *Sinar Baroe* di Semarang, *Sinar Matahari* di Yogyakarta, dan *Soeara Asia* di Surabaya, berubah menjadi suratkabar *Merdeka* (1 Oktober 1945 – sekarang), *Soeara Merdeka* (September 1945 – Juli 1947), *Warta Indonesia* (September 1945 – Nopember 1945), *Kedaulatan Rakjat* (27 September 1945 – sekarang), dan *Soeara Rakjat* (Oktober 1945 – Juli 1947).<sup>5</sup>

Suratkabar di kota-kota lain juga bermunculan laksana cendawan di musim hujan. Hal itu sejalan dengan anjuran dari

---

<sup>3</sup>Mochtar Lubis, tokoh wartawan dan sastrawan yang mengalami masa masa revolusi, menggambarkan suasana zaman pada masa itu sebagai, “[...] Ini revolusi sudah seperti banjir, dan tidak seorangpun yang bisa kuasai lagi perjalanannya. Apa yang kita lakukan, dia ambil jalannya sendiri”. Selanjutnya lihat novel Mochtar Lubis, *Jalan Tak Ada Ujung* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm.98.

<sup>4</sup>Ulrich Kratz, “Peranan Pers dalam Revolusi” dalam Collin Wild dan Peter Carey (eds.), *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm.49-51.

<sup>5</sup>Tentang perubahan suratkabar dari *Asia Raya* ke *Merdeka*; dan *Soeara Asia* ke *Soeara Rakjat*, lihat JR. Caniago *et al.*, *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka, 1945-1985* (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987), hlm.23-34; dan Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, *A. Azis Wartawan Kita* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm.82-103.

pemerintah, selain keinginan dari masyarakat sendiri, untuk mendirikan surat kabar sebanyak mungkin sebagai manifestasi dari revolusi yang demokratis. Maka di Jakarta, selain surat kabar *Merdeka*, terbit pula *Berita Indonesia*, *Ra'jat*, dan *Negara Baroe*; di Bogor ada *Gelora Rakjat*; di Cirebon ada *Republik* dan *Genderang*; di Magelang ada *Penghela Rakjat*; di Yogyakarta, selain *Kedaulatan Rakjat*, ada *Al-Djihad*, *Boeroeh*, dan *Nasional*; di Surakarta ada *Lasjkar*, *Soeara Moeda*, *Menara Islam*, dan *Perintis*; di Madiun ada *Api Rakjat*; di Mojokerto ada *Bhakti*; di Malang ada *Berdjeoang*, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Kebebasan bagi pers untuk mengekspresikan pendirian, sikap, dan pandangannya sangat jelas pada masa awal revolusi kemerdekaan. Semangat yang meluap dari rakyat untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, radikalisme sebagian besar pemuda untuk merebut senjata dari Jepang, dan pertempuran melawan tentara Sekutu yang diboncengi Nica-Belanda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, mejadi berita utama dan disorot dengan tajam dalam tajuk rencana surat kabar pada waktu itu. Identifikasi pers sebagai pembawa suara dan aspirasi rakyat, nampak dari pemilihan nama penjaga kolom pojok pada masing-masing surat kabar. Misalnya "Mas Kloboth" atau "Dr. Clenic" (*Merdeka*), "Mas Semprot" atau "Semar" (*Kedaulatan Rakjat*), "Bang Djeboel" (*Berita Indonesia*), "Bang Bedjad" (*Al-Djihad*), "Fikiran Rakjat" (*Warta Indonesia*), "Podjok Kiri" (*Genderang*), "Soedoet Tikam" (*Api Rakjat*), dan sebagainya.

Aneka karikatur, walaupun tidak banyak, untuk menyindir atau mendiskreditkan pihak lawan, terutama tentara Inggris dan Belanda, disajikan dengan cara telanjang dan terus terang. Sedangkan slogan, motto, atau kata-kata mutiara untuk membangkitkan semangat rakyat, sebagai renungan, dan arah perjuangan, ditempatkan pada bagian muka sudut kanan atau kiri surat kabar. Semuanya itu menunjukkan bahwa pers memiliki peranan yang tidak kecil sebagai "pengawal pendapat umum" selama revolusi Indonesia berlangsung.

---

<sup>6</sup>Wartini Santoso, *Katalog Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Nasional 1810-1984* (Jakarta: Perpusnas-Depdikbud, 1984).

## **Revolusi Kemerdekaan dan Tanggapan Pers**

Mungkin, peristiwa pertempuran yang terjadi pada bulan Oktober dan Nopember 1945 – terutama di Surabaya yang banyak memakan korban, baik materil maupun jiwa manusia – merupakan titik-balik bagi elite-pemimpin Indonesia untuk melakukan refleksi: apakah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu akan dilakukan dengan cara bertempur atau berdiplomasi. Pergumulan pemikiran dan akhirnya konflik kepentingan antara elite politik yang berbeda itu, untuk sebagian, terekam dengan baik dalam pers.

Dalam konteks ini nampaknya pers juga tidak tinggal diam, melainkan turut memberikan pandangan, sikap, dan pendiriannya secara bebas, sesuai dengan keyakinan politik dan warna ideologi masing-masing. Perbedaan visi terhadap revolusi, terutama yang menyangkut pilihan bertempur atau berunding, menyajikan gayawacana (*mode of discourse*) tersendiri bagi pers, setidak-tidaknya sampai dengan bulan Juli 1946.<sup>7</sup> Berikut ini adalah tanggapan pers dalam menanggapi isu politik penting pada masa awal revolusi Indonesia, dengan mengambil contoh pada surat kabar *Berita Indonesia* (Jakarta), *Warta Indonesia* (Semarang), dan *Lasjkar* (Solo).

### **A. *Berita Indonesia*: Berita yang Beraneka Warna**

Surat kabar *Berita Indonesia* (selanjutnya disingkat *BI*) mulai diterbitkan pada bulan September 1945.<sup>8</sup> Alamat redaksi pada mulanya di Asrama Balai Pengajaran Tinggi, Jalan Prapatan 10 Jakarta. Kemudian, karena situasi yang tidak aman, pindah ke Jalan

---

<sup>7</sup>Setelah bulan Juli 1946, orientasi berita pers lebih banyak ditujukan ke kejadian-kejadian di luar negeri, terutama yang berhubungan dengan perjuangan diplomasi Indonesia. Isu politik yang disajikan pers juga berubah, yakni mengenai pro dan kontra terhadap naskah Perundingan Linggarjati. Mengenai ini baca Susanto Zuhdi, "Perjanjian Linggarjati Dilihat oleh Beberapa Surat Kabar Lokal di Jawa" dalam A.B. Lopian & P.J. Drooglever (eds.), *Menelusuri Jalur Linggarjati* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1992), hlm.135-50.

<sup>8</sup>Edisi nomor perdana surat kabar ini tidak memakai tanggal. Ada yang menyebut tanggal 6 September 1945, ada pula yang menyebut tanggal 29 September 1945. Tapi kalau penerbitan surat kabar ini dimaksudkan sebagai tandingan terhadap *Berita Gunseikanbu* (Jepang) yang melarang berita-berita atau kegiatan yang mendukung proklamasi kemerdekaan, mungkin ia diterbitkan pada pertengahan bulan September 1945.

Cilacap No.6 Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1945. Harga langganan *BI* semula ditetapkan f 2,- sebulan. Kemudian berubah menjadi f 3,50 sebulan (3 Nopember 1945); dan berubah lagi menjadi f 6,- sebulan (18 Desember 1945) dengan ongkos kirim f 50 sen. Harga langganan surat kabar yang berubah-ubah tersebut menunjukkan keadaan ekonomi yang tidak stabil pada masa revolusi Indonesia. Sementara itu daerah penyebaran *BI*, selain Jakarta, meliputi juga daerah Serang, Rangkasbitung, Bogor, dan Pekalongan.<sup>9</sup>

Surat kabar *BI* selain menuliskan motto "*soeara perdjoeangan dalam kemerdekaan*", juga mengklaim dirinya sebagai "*soeara pemoeda*".<sup>10</sup> Akan tetapi, nampaknya, tidak semua pemuda memiliki persepsi dan visi yang sama dalam menyuarakan perjuangan kemerdekaan. Ada yang menghendaki cara berdiplomasi dan ada pula yang menginginkan jalan pertempuran. Yang menarik, ternyata dua pandangan dan keinginan yang berbeda itu berada dalam satu wadah, sehingga *BI* memberikan kesan sebagai surat kabar yang beraneka warna.

Sebagai contoh, dalam tajuk nomor perdananya *BI* menyatakan bahwa tujuan ditebitkannya surat kabar ini adalah agar masyarakat, "[...] *mendapat toentoenan2 dan penerangan2 jang djelas dan positif [...] goena mentjapai toedjoean kita, jakni terwoedjoeanja soeatoe Negara Repoebliek Indonesia jang diakoei oleh seloeroeh doenia*".<sup>11</sup> Suatu pernyataan tentang tujuan yang sejalan dengan politik diplomasinya pemerintah pada waktu itu. Tetapi dalam halaman yang sama terdapat tulisan dari pihak redaksi yang bertentangan dengan isi tajuk itu, yakni: "[...] *Tidak ada satoe bangsa diatas doenia ini boleh kita pertjajai. Bangsa jang mempertjajai bangsa lain [...] akan menoeliskan sendiri nasibnja: tertipoe dan terlantar !*".<sup>12</sup> Suatu pernyataan yang menyangsikan bahwa jalan diplomasi adalah pilihan yang benar.

---

<sup>9</sup>Berita "Warta Administrasi" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 20 Oktober 1945), hlm.4.

<sup>10</sup>*Berita Indonesia* (Jakarta: 25 Oktober 1945), hlm.1 dan 2.

<sup>11</sup>Tajuk "Memperkenalkan Diri" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: No.1), hlm.1.

<sup>12</sup>Opini "Perdjoeangan Kita" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: No.1), hlm. hlm.1.

Begitu juga ketika *BI* menurunkan tajuk tentang “Politik Republik Indonesia” yang secara jelas mendukung pernyataan Wakil Presiden Mohamad Hatta bahwa:

Kami para pemimpin sadar benar bahwa tanggoeng djawab kepada Tanah Air, bangsa, dan sedjarah kami pikoel sepenoeh-sepenoehnja. Kami sama sekali tidak mendjalankan politik “sandiwara”, akan tetapi adalah menoeroet pikiran dan menoeroet hati *geweten* kami. Kami bersedia berhadapan dengan mahkamah sedjarah jang akan mendjatoehkan kepoetoesan benar atau tidaknja politik jang kami djalankan kini. Politik jang diambil oleh Repoeblik Indonesia haroes dihadapkan kepada doenia internasional. Sekarang jang pertama perloe ialah diplomasi !<sup>13</sup>

Akan tetapi dalam nomor penerbitan berikutnya, *BI* menurunkan tulisan yang mengecam politik diplomasi itu. Tidak hanya mengecam, *BI* juga bahkan mengancam, “[...] akan mematahkan dan memoeshahkan tindakan2 kaoem kompromis dan reformis jang telah bersiap-siap hendak mendjoel bangsa dan tanah air dengan djalan kompromi kepada imperialis dan pendjadjah asing”.<sup>14</sup> Memang tulisan ini bukan tajuk rencana yang merupakan ekspresi dari sikap dan pendirian redaksi. Akan tetapi jika tulisan opini seperti itu juga dikemukakan oleh anggota redaksi, maka jelas *BI* merupakan pers yang terombang-ambing di antara dua pilihan sulit dalam menentukan strategi: berdiplomasi atau berperang melawan kekuatan asing.

Tentu saja tulisan-tulisan dalam *BI* yang isinya saling bertentangan itu membuat bingung para pembacanya. Dan ketika ada pertanyaan dari pembaca bahwa sebenarnya *BI* ini posisinya ada di mana, serta juga ditanyakan keberadaannya oleh, dari, dan untuk siapa, maka reaksi dari pihak redaksi adalah, “[...] *Pertanjaan ini tidak oesah didjawab*”. Dengan alasan yang klise bahwa *BI* ini dikerjakan dari, oleh, dan untuk rakyat, pihak redaksi selanjutnya

---

<sup>13</sup>Tajuk “Politik Republik Indonesia” dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: No.2), hlm.1.

<sup>14</sup>Opini “Masalah Kebangsaan Kita” dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: No.3), hlm.2.

menganjurkan (sekaligus memperingatkan) bahwa, “*kalau ada simpatie [...] sebarkan (BI, as) soepaja seloeroeh oemat di Indonesia membatjanja. Dan kalau ada jang anti djangan menghalangi, sebab nanti bisa hanjoet dalam Laoetan DARAH !*”<sup>15</sup>

Apa yang tersurat secara kontradiktif dalam *BI* itu, nampaknya, sejajar dengan realitas sosial di kota Jakarta yang penuh ketegangan sehubungan dengan kedatangan tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) pada bulan Oktober 1945. Bagi sebagian besar pemuda, kehadiran tentara Sekutu itu harus dilawan. Karena itu mereka berkesimpulan, sebagaimana dinyatakan dalam tajuk *BI*, “*Hanja satoe djalan ... BERPERANG !*”<sup>16</sup> Sedangkan bagi pemerintah (dalam hal ini Kabinet Soekarno-Hatta), masyarakat diharapkan tenang, tentram, berdisiplin, jangan bertindak sendiri-sendiri, dan siap-sedia. Dengan perkataan lain pemerintah, termasuk juga sebagian jajaran redaksi *BI*, menyatakan: “*Djaga keamanan oemoem, singkirkan apa jang menggegerkan masjarakat dan jang menimboelkan kesoelitan dengan tentera Sekotoe*”<sup>17</sup>

Sikap pasif dan ragu-ragu dari pemerintah itu, tentu saja, menggelisahkan masyarakat. Lebih-lebih pihak pemuda yang tidak sabar melihat keganasan tentara NICA dengan Batalion X-nya yang brutal itu. Dalam pandangan *BI*, tentara Belanda itu laksana seorang raksasa yang membabi-buta, rakus, dan jahat kepada bangsa Indonesia. Tujuannya jelas: ingin menjajah kembali Indonesia, suatu negeri yang kaya-raya. Terhadap perilaku dan sifat-sifat “raksasa” yang diperlihatkan oleh Belanda tersebut, menurut *BI*, hanya jiwa dan semangat “ksatria” bangsa Indonesia yang akan mampu mengatasainya. Kekuatan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bentuk raganya, tetapi oleh jiwa dan semangatnya. Gambar karikatur berikut ini (yang diambil dari surat kabar *Merdeka* di Jakarta) umumnya merupakan sikap, pendirian, pandangan, dan keyakinan pers Indonesia; dan khususnya redaksi *BI* tentang citra

---

<sup>15</sup>Lihat Catan Pojok dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: No.2), hlm.4.

<sup>16</sup>Tajuk “*Hanja satoe djalan ... BERPERANG !*” dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 7 Oktober 1945), hlm.3.

<sup>17</sup>*Berita* “*Makloemat Kepada Rakjat*” dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 7 Oktober 1945), hlm.3.

buruk Belanda dan perilaku sewenang-wenang tentara Belanda kepada bangsa Indonesia.

Sumber:  
*Merdeka* (Jakarta: 12 Oktober 1945).

Dalam hal kelambanan pemerintah menghadapi dan mengatasi kebrutalan tentara Belanda di Jakarta tersebut, *BI* menyatakan rasa heran dan kekecewaannya. "Bang Djeboel" (penjaga kolom pojok *BI*) dengan tepat menggambarkan perbedaan pandangan antara sikap pemerintah yang serba hati-hati dengan semangat rakyatnya yang bergelora pada masa-masa awal revolusi itu dalam bahasa yang khas sebagai berikut:

DJAMAN doeloe roepanja lain dengan djaman sekarang. Rakjat doeloe djoega lain dari rakjat sekarang. Dan begitoe poela pemimpin doeloe lain djoega dengan pemimpin sekarang. Kalau doeloe pemimpin bilang: "Ajo madjoe !", rakjat djawab: "Toenggoe doeloe, ach !" Tetapi sekarang kalau pemimpin bilang: "Tahan, sabar !", rakjat djawab: "Kenapa sabar, kami maoe njerobot, golok kami pengen mandi [darah, as] !" <sup>18</sup>

Ketika sikap politik pemerintah tidak berubah, maka para pemuda mulai mencari tokoh lain yang dinilai sesuai dengan irama revolusi dan dapat menghadapi pihak Sekutu dengan kepercayaan diri yang besar. Harapan pemuda itu terlaksana ketika pada tanggal 14 Nopember 1945 terjadi pergantian sistem pemerintahan dari kabinet presidential Soekarno-Hatta kepada kabinet parlementer Sjahrir-Amir Sjarifuddin.<sup>19</sup> Dan sehari sebelum pembentukan kabinet yang baru itu, *BI* menurunkan tajuk dengan mengutip sebagian dari isi brosur *Perdjoeangan Kita*-nya Sutan Sjahrir, terutama mengenai revolusi dan pembersihan, di mana orang-orang yang dinilai masih ragu-ragu perjuangannya dan tidak suci niatnya harus disingkirkan dari panggung revolusi Indonesia.<sup>20</sup>

Pada hari berikutnya, di mana pembentukan kabinet Sjahrir telah selesai, *BI* menyajikan dua tulisan sekaligus yang isinya "memuji" kabinet baru di satu sisi dan di sisi lain "mencela" kabinet lama. Dalam tulisan pertama dikatakan bahwa para menteri yang baru itu, "[...] meroepakan orang2 jang berperasaan tanggoeng djawab jang besar dan jang terboekti kedjoedjoerannja jang tahan oedji". Sedangkan anggota kabinet lama itu digambarkan sebagai, "[...]

---

<sup>18</sup>Catatan Pojok "Lain doeloe lain sekarang" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 10 Oktober 1945), hlm.4.

<sup>19</sup>Bagi lawan-lawan politik Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, pergantian sistem pemerintahan itu dinilai sebagai peristiwa *the silent coup* (kudeta diam-diam). Selanjutnya lihat, misalnya, Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm.195-218; dan Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi* (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hlm.414.

<sup>20</sup>Tajuk "Kabinet Baroe" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 13 Nopember 1945), hlm.1. Tentang isi selengkapnya brosur itu, lihat Sutan Sjahrir, *Our Struggle*, Terjemahan dan Kata Pengantar oleh Benedict R.O'G. Anderson (New York, Ithaca: Cornell University, 1968).

*advontoeir2 politik dan desperado2 jang tidak ada perasaan tanggoeng djawab sedikitpoen*".<sup>21</sup> Begitu juga dalam tulisan kedua, para menteri yang baru itu dipuji karena, "[...] *boekan sahabat karib Yamamoto, Shimizu, atau Maeda. Mereka tidak mendjadi menteri boeat sandiwara, mereka adalah orang2 soetji, moerni, dan koeat ketjakapannja jang soedah dikenal dalam praktik*". Sedangkan anggota kabinet yang lama itu dicela karena, "[...] *orang jang soeka berpidato dengan gembar-gembor 2 atau 3 djam lamanja, meskipoen pidatonja itoe tak berisi sama sekali !*".<sup>22</sup> Maksud tulisan-tulisan dalam BI tersebut jelas arahnya, yakni ditujukan kepada golongan nasionalis, militer, dan birokrasi yang mau bekerjasama dan menjadi kaki-tangan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

Namun harapan kepada kabinet baru agar bertindak lebih revolusioner, nampaknya, terlalu berlebihan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata kabinet Sjahrir-Amir ini juga tidak kalah moderatnya dengan kabinet Soekarno-Hatta. Walaupun Sutan Sjahrir sendiri, sebagai Perdana Menteri, sering menyatakan bahwa kabinetnya tidak kenal kompromi dengan Belanda, tetapi pada saat yang sama ia juga meminta kepada masyarakat Indonesia untuk memahami betapa pentingnya perjuangan diplomasi itu.<sup>23</sup> Sikap dan kebijakan Sjahrir itu acapkali dinilai oleh lawan-lawan politiknya sebagai usaha hanya untuk menjatuhkan mereka. Pada akhirnya, pemerintahan Sjahrir mendapatkan kritik dan rekasi yang keras dari pihak oposisi.

Tentu saja, sikap moderat kabinet baru, dalam hal ini pemerintah Sjahrir, dan politik diplomasinya yang mulai dijalankan terhadap Inggris dan Belanda itu mengecewakan lagi sebagian besar pemuda. Mereka, sebagaimana dinyatakan dalam *BI*, tidak percaya

---

<sup>21</sup>Opini "Kearah Indonesia Baroe" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 14 Nopember 1945), hlm.1.

<sup>22</sup>Opini "Lenjaplah Birokrasi Djepang" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 14 November 1945), hlm.2.

<sup>23</sup>Berita "Kabinet baroe tidak kenal kompromi" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 16 Nopember 1945), hlm.1; di mana Sutan Sjahrir antara lain menyatakan, "[...] *djanganlah hendaknja orang salah mengerti kalau Pemerintah mengadakan pemboekaan dengan lain2 pihak, karena kalau ada pihak loear hendak mendekati kita, kita haroes meladeni, sebab kita tidak dapat berboeat seakan-akan doenia tidak ada, dan hanja kita sadja jang ada di doenia ini*".

pada jalan diplomasi. “Kalau hanja berdiplomasi kedoenia internasional sadja [...] ini baroe 25% dari toedjoeannja. Jang 75% lagi adalah memboeka mata rakjat selebar-lebarnja, siapakah Belanda dan Inggeris itoe”. Nampaknya bagi para pemuda, Inggris itu dinilainya sebagai “[...] embahnja imperialis dan goeroe besar dari imperialis Belanda”.<sup>24</sup> Sedangkan dalam pandangan “Bang Djeboel”, penjaga kolom catatan pojok *BI*, Belanda itu dinilainya sebagai, “[...] orang2 kepala kedjoe dari tanah betjek hollan, jang pernah minta ampoen kepada si kerdil [Jepang, as], jang maboer sebeloem melihat moesoeh, (tapi) sekarang datang lagi dan berlagak seperti orang jang menang [perang, as]”.<sup>25</sup>

Sementara itu langkah Sutan Sjahrir untuk melakukan politik diplomasinya semakin mantap. Pada tanggal 15 Desember 1945 ia berpidato di depan radio dengan menyatakan tentang perlunya pikiran yang tenang, penuh perhitungan, tidak asal semangat meluap, kerja teratur, dan disiplin dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pernyataan itu jelas untuk menenangkan sebagian besar pemuda yang berjiwa revolusioner. Dan dalam hal ini, nampaknya, *BI* juga menyetujui isi pidato Sutan Sjahrir itu dan meramunya dalam suatu tulisan dengan judul yang tepat, “Pikiran dan Semangat”.<sup>26</sup> Di pihak lain, sebagian besar pemuda yang kecewa dengan kepemimpinan Sjahrir dan politik diplomasinya itu mulai mencari tokoh idola lain yang lebih radikal dan revolusioner. Pencarian itu semakin jelas sosoknya ketika Muhammad Yamin, tokoh pergerakan nasional radikal, menulis secara panjang-lebar dalam *BI* – dan ditempatkan sebagai sajian berita utama – dengan judul: “TAN MALACCA, Bapak Republik Indonesia”.<sup>27</sup> Tan Malaka sendiri kemudian menulis brosur *Politik dan Moeslihat* sebagai tandingan terhadap brosur *Perdjoeangan Kita*-nya Sutan Sjahrir.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Tajuk “Kemenangan Kita” dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 1 Desember 1945), hlm.1.

<sup>25</sup>Catatan pojok *Berita Indonesia* (Jakarta: 30 Oktober 1945), hlm.4.

<sup>26</sup>Opini “Pikiran dan Semangat” dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 16 Desember 1945), hlm.1.

<sup>27</sup>Berita “TAN MALACCA, Bapak Republik Indonesia” dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 26 Desember 1945), hlm.1.

<sup>28</sup>Dalam pandangan Tan Malaka, revolusi Indonesia itu harus ditempatkan sebagai perjuangan revolusioner dan total untuk merubah keadaan struktur sosial-politik yang sudah mapan. Perjuangan harus dilakukan dengan memobilisir

Pemikiran Tan Malaka yang radikal dan revolusioner itu segera mewarnai *BI*. Dalam tajuknya "Rakjat Moerba Menoentoet !", *BI* tidak hanya mengkritik dan mengancam pemerintah Sjahrir yang moderat, tetapi juga menuntut kepemimpinan bentuk lain, "[...] *jang mengerti dan toeroet merasai akan soeasana jang melingkoengi Rakjat Moerba itoe dengan arti kata jang sedalam-dalamnja*". Tajuk itu juga menyatakan, "[...] *rakjat rela mentjoerahkan darahnja, bertempoer menjerahkan djiwanja, oentoek tetap berdirinja Negara Rakjat jang berbentoeck Repoeblik Indonesia*". Akhirnya tajuk itu mengajak kepada golongan terpelajar, pemuda intelegensia, dan para hartawan agar, "[...] *benar2 mentjeboerkan dirinja kedalam barisan Rakjat [...] dalam perdjoeangan jang hebat ini*".<sup>29</sup>

Bersamaan dengan semakin menguatnya kegiatan oposisi yang dipimpin oleh Tan Malaka, pemerintah Sjahrir juga dihadapkan pada persoalan "revolusi sosial" di daerah-daerah seperti Banten, Tegal, Brebes, dan Pekalongan.<sup>30</sup> Sebagai konsekuensi dari politik diplomasi, tentu saja, pemerintah Sjahrir tidak menyetujui aksi-aksi "pendaulatan rakjat" dalam peristiwa itu. Dengan perkataan lain, aksi-aksi yang revolusioner dari elemen masyarakat itu harus dihentikan untuk menjaga wibawa pemerintah dalam menjaga kestabilan dan ketenangan politik. Dan *BI* yang penyebarannya sampai ke daerah Pekalongan ternyata, dalam hal ini, lebih memihak kepada pemerintah. "Bang Djeboel" sendiri bahkan mendiskreditkan para pelaku drama dalam revolusi sosial itu melalui catatan pojoknya yang khas, sebagai berikut:

---

semangat dan kekuatan rakyat, mengambil alih dan menguasai sumber-sumber produksi ekonomi, serta menolak berunding dengan pihak musuh sebelum mereka meninggalkan tanah air Indonesia dan mau mengakui kemerdekaan Indonesia 100%. Selanjutnya lihat Rudolf Mrazek, *Semesta Tan Malaka*, Terjemahan (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hlm.81-101.

<sup>29</sup>"Rakjat Moerba Menoentoet !" dalam *Berita Indonesia* (Jakarta: 27 Desember 1945), hlm.1.

<sup>30</sup>Tentang peristiwa revolusi sosial di daerah Banten, lihat Michael C. Williams, "Utang Padi Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah" dalam Audrey Kahin (ed.), *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, Terjemahan (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1990), hlm.60-88; sedangkan tentang revolusi sosial di wilayah karesidenan Pekalongan, lihat Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, Terjemahan (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1989).

BELAKANGAN ini hati Bang Djeboel sebenarnja sangat dipengaroehi angka 3½. Karena memikirkan itoe sadja Bang Djeboel sampai 3½ malam tidak bisa tidoer. Bangsa kita oedah didjajah sama Belanda 3½ abad, lantasi datang si Djepang dan menghisap darah rakjat selama 3½ tahoen. Kemoedian seorang pengchianat meradjalela di Tegal selama 3½ boelan, penghabisan ia djadi (p)residen Pekalongan selama 3½ hari. Hiiiiii, benar2 tjilaka 3½ !<sup>31</sup>

Namun setelah pemihakannya yang jelas kepada pemerintah Sjahrir dalam melihat masalah revolusi sosial di daerah itu, *BI* kembali menaruh simpati kepada pihak oposisi. Himbauan Tan Malaka, "*Meriam Menggoentoer Memanggil Pemoeda Melandjoetkan Perdjoengan Pahlawan2 Kita !*", dijadikan berita utama.<sup>32</sup> Sementara itu bagian-bagian tertentu dari dialog "Si Paloe" dan "Si Godam" yang radikal - sebagaimana terdapat dalam brosur *Moeslihat* karya Tan Malaka - dikutip sebagai motto perjuangan dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri atau kanan halaman pertama *BI*.

Demikianlah *BI* yang sampai dengan pertengahan bulan Pebruari 1946 pun masih menyajikan berita (*news*) dan pandangan-pandangan (*views*) yang bertentangan dalam dirinya sendiri, terutama dalam menghadapi isu politik tentang perlunya bertempur atau berunding. Sementara itu tanggal 16 Pebruari 1946, nampaknya, merupakan hari terakhir bagi *BI* sebagai media massa yang beraneka warna. Kepada para pembacanya, pihak redaksi hanya memberitahukan bahwa *BI*, "[...] boeat sementara waktoe tidak terbit", yang kemudian dilanjutkan dengan harapan, "[...] moga-moga Berita Indonesia akan terbit kembali dengan segala tenaga dan kekeoatan baroe".<sup>33</sup> Belum diketahui secara pasti mengapa *BI* menghentikan penerbitannya untuk sementara waktu. Sangat boleh jadi ia mendapat tekanan yang keras dari pemerintah Sjahrir. Hal itu terlihat ketika *BI* terbit kembali pada bulan Juni 1946, warna dan isi beritanya menjadi "lain", yaitu lebih mendukung kebijakan politik

---

<sup>31</sup>Pojok *Berita Indonesia* (Jakarta: 11 Januari 1946), hlm.2.

<sup>32</sup>*Berita Indonesia* (Jakarta: 10 Januari 1946), hlm.1.

<sup>33</sup>*Berita Indonesia* (Jakarta: 16 Pebruari 1946), hlm.1.

diplomasi pemerintah Sjahrir. Foto-foto dan kutipan pidato dari Sutan Sjahrir (Perdana Menteri) dan Amir Sjarifoedin (Menteri Pertahanan) dijadikan sebagai motto dan ditempatkan pada halaman pertama di sudut kiri atau kanan atas surat kabar itu.

## **B. *Warta Indonesia: Wartanya yang Berkuasa***

Surat kabar *Warta Indonesia* (selanjutnya disingkat *WI*), mulai diterbitkan pada tanggal 29 September 1945. Alamat redaksi *WI* di Purwodinatan Tengah No.22-24-26 Semarang, Jawa Tengah. Harga langganan semula ditetapkan f 2,60 perbulan, di mana “[...] *jang 10 sen oentoek Fonds Kemerdekaan*”. Kemudian sejak tanggal 1 November 1945 harga langganan dinaikkan lagi menjadi f 3,- perbulan, di mana “[...] *jang 50 sen oentoek Fonds Kemenerdakaan*”. Harga yang berubah-ubah itu, sebagaimana telah dikemukakan, merupakan konsekuensi dari kondisi ekonomi yang tidak stabil pada masa revolusi. Dan sumbangan pers, termasuk masyarakat lainnya, untuk memberikan kontribusi berupa dana untuk revolusi kemerdekaan adalah juga hal yang lumrah dan dianjurkan pada masa itu.

Walaupun terbit di daerah pendudukan tentara Sekutu, karena sejak akhir bulan September dan awal bulan Oktober 1945 kota Semarang telah diduduki tentara Inggris dan Belanda, *WI* berbeda dengan *BI* di Jakarta yang isinya beraneka warna itu. Surat kabar *WI* di Semarang nampak lebih tenang, bahkan cenderung pada satu warna yakni dominannya suara pemerintah Republik Indonesia. Hal itu bisa dimaklumi sebab tujuan diterbitkannya *WI* adalah: “*Oentoek membantoe oesaha K.N.I. choesoensja, serta segenap oesaha bangsa Indonesia oemoemnja jang bersifat membangoen (constructief) jang bermanfaat bagi langsoengnja Repoeblik Indonesia*”.<sup>34</sup> Bahkan dalam tajuk nomor perdananya, *WI* dengan jelas dan tegas menunjukkan ke mana arah kebijakan politik pemerintah itu akan ditempuh. “*Kita akan melakoekan diplomasi dengan negeri2 Serikat ...*”, katanya.<sup>35</sup> Dan untuk meyakinkan masyarakat betapa pentingnya

---

<sup>34</sup>Motto *Warta Indonesia* (Semarang: 29 September 1945), hlm.1.

<sup>35</sup>Tajuk “Dekrit Presiden Kita” dalam *Warta Indonesia* (Semarang: 29 September 1945), hlm.1.

politik yang ditetapkan oleh pemerintah itu, *WI* menjelaskan makna “diplomasi” dalam mempertahankan kemerdekaan sebagai berikut:

Negara kita, Repoeblik Indonesia, berdjoeang berdiplomasi. Diplomasi jang bidjaksana, dalam soeasana perdamaian. [...] Diplomasi boekan berarti hanja beroending bertjakap-tjakap berpoetar lidah, perdamaian boekan berarti hanja membitjarakan jang baik-baik. Sebaliknja, perdjoeangan boekan mesti saling bertoeboek, dan menjoesoen kekoetaan boekan berarti mesti saling bertindjoe. Negara kita berdjoeang-berdiplomasi. Artinja, Repoeblik Indonesia menghendaki peroendingan dengan doenia internasional oentoek mempertahankan kedoedoekan Repoeblik Indonesia itoe.<sup>36</sup>

*WI* terhenti penerbitannya, untuk sementara, selama satu minggu karena ada pertempuran lima hari di kota Semarang. Bagi mereka yang berjiwa revolusioner, tentu saja, pertempuran “heroik” itu harus dilanjutkan sebagai wujud paling kongkrit dalam mempertahankan kemerdekaan. Tetapi *WI* berpendapat lain. Dalam tajuk berjudul “Kenjataan”, *WI* ingin menunjukkan bahwa cara berjuang dengan bertempur itu, “[...] lebih banjak menoempahkan darah, dan lebih banjak memberikan koerban djiwa”. Karena itu, *WI* berkesimpulan, “[...] kita haroes tjari djalan diplomasi jang sebaik-baiknja”.<sup>37</sup> Akan tetapi, cukup menarik juga, *WI* memiliki persepsi yang agak berbeda dengan pemerintah, terutama dalam hal diplomasi dengan Belanda. *WI* hanya menghendaki berunding dengan pihak Sekutu, bukan dengan pihak Belanda. Dalam tajuk yang berjudul “Dengan Belanda Tidak Ada Peroendingan”, *WI* menjelaskan pendiriannya itu sebagai berikut:

Benar kita akan mendjalankan diplomasi. Kita akan beroending baik-baik dengan siapapoen djoega, teroetama dengan negeri-negeri Serikat. Tetapi kita tidak maoe beroending, tidak maoe berdiplomasi dengan Belanda. [...] Moengkin kita nanti soeka

---

<sup>36</sup>Tajuk “Diplomasi Kita” dalam *Warta Indonesia* (Semarang: 1 Oktober 1945), hlm.1.

<sup>37</sup>Tajuk “Kenjataan” dalam *Warta Indonesia* (Semarang: 26 Oktober 1945), hlm.1.

beroending dengan belanda, yakni sesoedah kemerdekaan Indonesia jang 100% diakoeinja. [...] Moedah2an pendirian ini dimengerti betoel2 oleh Pemerintah kita. Tak ada peroendingan dengan belanda !<sup>38</sup>

Walaupun tidak sependapat dengan pemerintah dalam memaknai arti “diplomasi dengan Belanda”, bukan berarti WI menghendaki jalan pertempuran. Hal itu terlihat ketika terjadi pertempuran di Magelang pada bulan Oktober 1945, WI menempatkan tulisan “*Amanat P.J.M. Presiden R.I. kepada Rakjat jang Bertepmoer di Magelang*” yang pada intinya meminta rakyat, “[...] oentoek menghentikan pertempoeran”, sebagai berita utamanya.<sup>39</sup> Dalam pandangan WI, simpati dan dukungan dari dunia internasional terhadap negara RI lebih diutamakan daripada memilih jalan pertempuran yang hanya akan mengundang antipati dari banyak kalangan.

Memasuki bulan Nopember 1945, pertempuran melawan tentara Sekutu di kota-kota besar di Jawa terus berlangsung. Pertempuran yang banyak memakan korban jiwa dan harta benda itu, memunculkan semacam renungan: apa makna pengorbanan dan apa arti kematian dalam mempertahankan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia umumnya dan bagi umat Islam Indonesia khususnya? Dalam catatan pojok “*Fikiran Rakjat*” yang ditulis oleh Haji Moenawar Cholil, WI mengeluarkan semacam fatwa - bersamaan dengan meletusnya pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya - bahwa barang siapa mati terbunuh lantaran mempertahankan harta bendanya, dirinya, keluarganya, agamanya, dan tanah airnya dari bahaya penjajahan, “[...] maka mereka itoe termasuk mati sjahid djoega”.<sup>40</sup> Apa yang ingin ditekankan oleh WI adalah simpati terhadap korban pertempuran, betapapun pilihan kebijakan pimpinan redaksi tetap menghendaki jalan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini penting dicatat mengingat

---

<sup>38</sup>Tajuk “*Dengan Belanda Tidak Ada Peroendingan*” dalam *Warta Indonesia* (Semarang: 30 Oktober 1945), hlm.1.

<sup>39</sup>*Warta Indonesia* (Semarang: 2 Nopember 1945), hlm.1.

<sup>40</sup>Pojok “*Kata Nabi Moehammad S.A.W.*” dalam *Warta Indonesia* (Semarang: 10 Nopember 1945), hlm.2.

banyak pers yang menjadi corong politik pemerintah Sjahrir pada umumnya bersikap sinis dan tidak menaruh simpati kepada mereka yang menjadi korban dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan.

Karena keadaan kota Semarang yang tidak aman lagi, maka *WI* hanya mampu meneruskan penerbitannya sampai tanggal 14 November 1945, persis saat terjadi pergantian sistem pemerintahan dari Soekarno-Hatta ke Sutan Sjahrir-Amir Sjarifoedin. Bagaimana pandangan, sikap, dan pendirian *WI* terhadap penguasa baru itu – seandainya masih terus terbit – tidak diketahui secara pasti. Kita hanya bisa menduga bahwa *WI*, bagaimanapun, adalah tetap wartanya pihak yang berkuasa. Hal itu bisa ditengarai bahwa sebenarnya sejak tanggal 3 Nopember 1945, *WI* sudah menurunkan tajuknya dengan mengharapkan Sutan Sjahrir sebagai “*bintang toentoenan, lintang panoetan, atau guiding star*” untuk memimpin revolusi Indonesia.

### **C. *Lasjkar*: Pers Moderat di Daerah Republik**

Suratkabar *Lasjkar* mulai terbit pada tanggal 1 Desember 1945. Alamat redaksi di Lojiwurung No.10 Solo, Jawa Tengah. Menurut pihak Redaksi sendiri, *Lasjkar* ini sebenarnya merupakan leburan dari suratkabar *Merah-Poetih* dan *Banteng*.<sup>41</sup> Harga langganan suratkabar *Lasjkar* semula ditetapkan f 5,- sebulan, dengan eceran 30 sen. Kemudian berubah menjadi f 7,50 sebulan, dengan harga eceran 40 sen (1 Pebruari 1946). Dan terakhir harga langganan naik lagi menjadi f 13,- sebulan, dengan harga eceran 60 sen (2 Mei 1946).<sup>42</sup> Adapun daerah penyebaran suratkabar *Lasjkar*, selain Solo, sampai

---

<sup>41</sup>Berita “Berita Tata Oesaha” dalam *Lasjkar* (Solo: 1 Desember 1945), hlm.2.

<sup>42</sup>Barangkali untuk melihat tinggi-rendahnya harga suratkabar pada waktu itu, kita bisa membandingkannya dengan harga beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Pada akhir tahun 1945 harga eceran suratkabar, sebagaimana ditunjukkan oleh *Lasjkar*, sekitar 30 sen; sedangkan harga beras 1 kg, menurut harga resmi dari pemerintah, sekitar 15 sen. Bandingkan dengan keadaan menjelang 50 tahun Indonesia merdeka (di tahun 1994), di mana harga eceran suratkabar sekitar 5-600 rupiah; sedangkan harga beras 1 kg sekitar 750-1.000 rupiah. Dengan begitu maka harga suratkabar pada masa revolusi itu memang relatif mahal, tapi harus juga diingat bahwa pada waktu itu satu suratkabar, biasanya, sering dibaca oleh banyak orang secara bergiliran.

juga di daerah Klaten, Delangu, Rembang, Jombang, dan sebagainya.<sup>43</sup> Dari segmen para pelanggannya, jelas surat kabar ini merupakan pers lokal yang cukup berpengaruh dan diperhitungkan di daerah Solo, Jawa Tengah.

Pada nomor perdana penerbitannya, surat kabar *Lasjkar* dengan bangga mencantumkan motto: “Diseloeroeh Indonesia ini ada banjak partai2, perkoempoelan2, badan2 perdjoeangan, tapi satoe djangan diloepakan, TENAGA LASJKAR-lah jang teramat penting pada waktoe ini”.<sup>44</sup> Walaupun begitu cukup menarik juga, bahwa surat kabar *Lasjkar* yang terbit di Solo – yang dikenal sebagai kota oposisi terhadap pemerintah RI yang berpusat di Yogyakarta pada masa revolusi itu – suaranya agak berbeda dengan kemauan tenaga lasykar yang sebenarnya. Kalau “tenaga” lasykar pada umumnya bersifat radikal dan menghendaki perjuangan dengan cara pertempuran, maka “suara” *Lasjkar* (sebagai surat kabar) ternyata cukup moderat, bersifat mendamaikan, dan dalam derajat tertentu cenderung berpihak kepada pemerintah. Sikap moderat surat kabar *Lasjkar* nampak juga ketika salah seorang pembacanya meminta agar nama pers ini diganti saja menjadi *Darah Ra'jat*, sesuai dengan dinamika revolusi yang semakin hebat, ternyata tidak disetujui oleh pihak redaksi.<sup>45</sup>

Sikap dan pandangan yang moderat dari surat kabar *Lasjkar* juga terlihat pada sisi yang lain. Ketika di berbagai daerah timbul aksi-aksi “pendaulatan rakyat” dalam revolusi sosial, misalnya, surat kabar *Lasjkar* menurunkan tajuk “Kedaulatan Rakjat” yang isinya, antara lain, mengecam aksi-aksi sepihak itu.<sup>46</sup> Dengan

---

<sup>43</sup>Informasi tentang daerah penyebaran surat kabar ini diperoleh dari surat-surat pembaca yang masuk ke meja redaksi dan dikomentari oleh “Sepandri” (penjaga kolom catatan pojok *Lasjkar*) pada setiap hari Sabtu dengan judul “Pinggir Garis: Malem Minggon”. Lihat, misalnya, pojok *Lasjkar* (Solo: 12 dan 19 Januari 1946), hlm.2.

<sup>44</sup>Motto *Lasjkar* (Solo: 1 Desember 1945), hlm.1.

<sup>45</sup>Pojok “Pinggir Garis: Malem Minggon” dalam *Lasjkar* (Solo: 26 Januari 1946), hlm.2.

<sup>46</sup>Tajuk “Kedaulatan Rakjat” dalam *Lasjkar* (Solo: 26 Desember 1945), hlm.1, yang juga menyatakan, di antaranya, “[...] kedaulatan rakjat itoe boekan berarti rakjat dapat atau boleh bertindak sendiri2, semaoe-maoenja sadja. Haroes ada atoeran, ada tatanan. Karena kalau tidak ada atoeran, berarti anarchie”.

menyadari pula bahwa para pembacanya berada dalam lingkungan kebudayaan Jawa, surat kabar *Lasjkar* lalu menyajikan tulisan Ki Hajar Dewantara tentang “Arti Kata Kemerdekaan” sebagai berikut:

*Mardika ikoe djarwanja nora moeng lepasing pangreh. Nging oega koewat koewasa, aman diri prijangga. Wit saka ikoe den emoet, wadjib lan wenang tan pisah. Artinja: merdeka itoe tidak hanja berarti lepas dari pengoeasa, tetapi berarti poela koeat dan berkoeasa berdiri sendiri. Karena itoelah haroes dimengerti bahwa kewadajiban dan hak kemerdekaan itoe tak boleh dipisah-pisahkan.<sup>47</sup>*

Memasuki tahun 1946, signifikansi politik diplomasi dari pemerintah digugat secara kritis oleh pihak oposisi. Pembentukan organisasi Persatuan Perjuangan yang digalang oleh pihak oposisi memang diberitakan oleh surat kabar *Lasjkar*, tetapi tidak ditempatkan sebagai berita utama.<sup>48</sup> Begitu juga dengan slogan paling populer dari pihak oposisi tentang “*toentoetan kemerdekaan 100 prosen*” dan “*menolak beroending dengan siapapoen sebeloem moesoeh meninggalkan pantai dan laoet kita*” dijadikan berita biasa saja oleh surat kabar *Lasjkar*.<sup>49</sup> Surat kabar ini baru menurunkan berita utamanya, ketika di Magelang diadakan “Permusyawaratan Lasykar Rakyat Seluruh Indonesia” pada tanggal 27 Pebruari 1946 di mana dalam permusyawaratan itu hadir Panglima Besar Jenderal Soedirman yang, nampaknya, juga menaruh simpati kepada pihak oposisi. Dalam pertemuan itu dinyatakan bahwa lasykar-lasykar rakyat menyatakan siap berjuang dan bertempur dengan pihak Belanda apabila kemerdekaan Indonesia tidak diakui 100 persen. Surat kabar *Lasjkar* kemudian mencatat pernyataan Jenderal Soedirman bahwa tentara tidak akan membiarkan rakyat Indonesia diterkam oleh imperialis dan kapitalis. Ia juga meminta agar tidak terjadi *provokasi*, yang diartikannya sebagai “*pro dimoeka ... reaksi*

---

<sup>47</sup>Ki Hajar Dewantara, “Arti Kata Kemerdekaan” dalam *Lasjkar* (Solo: 1 Pebruari 1946), hlm.2.

<sup>48</sup>Lihat, misalnya, berita “Permoesjawaratan Persatoean Perdjoengan, Hari Kedoea” dalam *Lasjkar* (Solo: 30 Januari 1946), hlm.2.

<sup>49</sup>Lihat, misalnya, berita “Persatoean Perdjoengan Tidak Iri Bereboet Koersi” dalam *Lasjkar* (Solo: 30 Januari 1946), hlm.2.

*dibelakang*". Akhirnya ucapan Jenderal Soedirman yang terkenal dan membuat peserta rapat makin bersemangat, menurut surat kabar *Lasjkar*, adalah: "*Lebih baik diatoom daripada merdeka koerang dari seratoes prosen!*"<sup>50</sup>

Tantangan dari pihak oposisi, yang juga didukung oleh pihak tentara itu, menyebabkan kabinet Sjahrir jatuh pada tanggal 28 Pebruari 1946. Tetapi Presiden Soekarno memilih kembali Sutan Sjahrir sebagai formateur kabinet. Dalam menyusun kabinet baru itu, Sjahrir tetap menempatkan orang-orang "seideologinya" memegang posisi-posisi kunci dalam pemerintahan, sehingga tidak terjadi koalisi dengan pihak oposisi. Melihat komposisi kabinet seperti itu, surat kabar *Lasjkar* hanya bisa menganjurkan agar pemerintah baru itu merupakan kabinet *koalisi* yang diartikannya, secara jenaka, sebagai: "[...] djangan seperti *koewali ta' isi*, tetapi ja *koewali isi* betoel-betoel"<sup>51</sup> Sebagai pers yang moderat, surat kabar *Lasjkar* menghendaki agar integrasi antara pemerintah Sjahrir dengan pihak oposisi menjadi kenyataan. Namun harapan ini tidak diakomodasi oleh pihak pemerintah.

Karena harapan dan kepentingan politiknya tidak terpenuhi, maka pihak oposisi melanjutkan kegiatannya kembali. Tanda-tanda perpecahan, karena perbedaan visi dan interpretasi terhadap revolusi, mulai mengancam integrasi politik bangsa. Bagi masyarakat kebanyakan, harapan akan persatuan itu menjadi keniscayaan manakala sedang menghadapi musuh (Belanda) yang benar-benar nampak di depan mata. Dalam catatan pojoknya yang berjudul "Mbok ja ... Bersatoe", surat kabar *Lasjkar* menuliskan harapan akan persatuan dari berbagai golongan dalam masyarakat itu sebagai berikut:

[...] Pak Sepandri, heran seriboe heran, kalau kita disaat jang segenting ini [...] antara bangsa sama bangsa kita ada jang terdjadi roedjak sentoel alias ngalor ngidoel. Pemerintah minta

---

<sup>50</sup>*Lasjkar* (Solo: 27 Pebruari 1946), hlm.1. Tentang pandangan, sikap, dan perilaku politik Panglima Besar Jenderal Soedirman selama revolusi, lihat Salim Said, *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics, 1945-49* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992).

<sup>51</sup>Pojok *Lasjkar* (Solo: 14 Maret 1946), hlm.2.

begini, rakjat maoenja begitoe. Padahal semoea lasjkar dari matjam-matjam partai dan golongan tidak banjak rewel apa-apa. Tjoeming satoe hati satoe kata, jalah “gempoer”, sekali lagi “gempoer”, sampai moesoeh didjengkangkan di samoedera Djawa sana. Lha kok dibelakang garis pating gedobrak, pating gedeboeg, pating pethiti, nggak bisa seia sekata.

Pak, atas kebidjaksanaan bapak, moelai ini detik kerahkanlah semoea lasjkar dengan barisannja jang teratoer. Soesoennnja barisan begini: Dimoeka sendiri, *Boeng Karno* naik *Banteng*, *Boeng Hatta* naik *Koeda Poetih* dikirinja, *Boeng Sjahrir* naik *Gadjah* dikanannja (biar poenja semangat *Gadjah Mada*). *Boeng Tan Malaka* naik *Harimau Merah* dibelakang mereka, bersama-sama dengan dr. Soekiman jang naik *Oenta* (pindjaman dari Pemoeda Arab Indonesia), *Boeng Dirman* naik *bomber*, *Boeng Tomo* naik *Djager* [...] dengan tidak ketinggalan *Boeng Moewardi* naik *otto lapis badja* dengan tanda kepala *bantengnja* jang *singer itoe*.

Achirnja barisan pemimpin ini diikoeti oleh segenap Lasjkar dan T.R.L., B.P.R.L., Barisan Banteng, Lasjkar Poeteri, Lasjkar Boeroeh, Lasjkar Merah, Lasjkar Pesindo, Hizboellah, Sabilillah, dan siapa lagi jang poenja lasjkar, dengan didjenderali oleh Chairuel Saleh serta Ibnu Parna, sementara sdr. Zainal Arifien memimpin pasoekan berani mati. Mortier, Tommy Gun, tank2, lorie, lengkap dengan Palang Merah kita, dapoer mobiel kita, dan barisan Teknik kita ikoet dibelakang.

Barisan besar ini bikin demonstrasi, masoek kota Djakarta dengan seroean: Allahoe Akbar tiga kali, disamboeng dengan: *Belanda-nieadir uit !* Kalau tidak maoe, kita tendang sampai ketjemploeng laoet.<sup>52</sup>

Persatuan yang “dilamoenkan” masyarakat dan disetujui oleh surat kabar *Lasjkar* itu, ternyata, tidak menjadi kenyataan. Pemerintah sendiri, kemudian, sikapnya lebih keras kepada pihak oposisi. Pada tanggal 18 Maret 1946, pemerintah (dalam hal ini Menteri Pertahanan, Mr. Amir Sjarifuddin; dan Menteri Dalam Negeri, Dr. Soedarsono) mengeluarkan maklumat yang berisi ancaman keras kepada siapa saja yang, “*menjiarkan baerita2 atau melakoekan perboeatan2 jang dapat menggelisahkan atau mengatjaukan masjarakat [...]*”

---

<sup>52</sup>Pojok “Mbok ja ... Bersatoe” dalam *Lasjkar* (Solo: 9 Maret 1946), hlm.2.

dengan maksoed mengadakan perpetjahan [...] menghambat oesaha dalam menjempeornakan pertahanan Negara".<sup>53</sup> Segera pemerintah, setelah maklumat itu dikeluarkan, mengadakan razia politik dengan menangkap tokoh-tokoh oposisi yang dianggap menggelisahkan dan mengacaukan masyarakat. Melihat kejadian itu, pihak tentara segera menyatakan sikapnya bahwa penangkapan terhadap tokoh-tokoh oposisi itu sekali-kali bukan dilakukan atas perintah Markas Besar Tentara.<sup>54</sup> Jelas sekali di sini bahwa kebijakan politik pemerintah tidak mendapat dukungan dari pihak tentara.

Sementara itu situasi di kota Solo juga semakin tegang, sehubungan dengan adanya gerakan anti swapraja yang menentang otoritas penguasa tradisional seperti Kasunanan dan Mangkunegaran. Sikap pemerintah dalam hal ini sudah jelas dan tegas – sebagaimana ditunjukkannya terhadap gerakan “pendaulatan rakyat” di Banten, Tegal, dan Pekalongan – yaitu tidak menyetujui gerakan seperti itu. Maka pemerintah kembali menangkap tokoh-tokoh gerakan anti swapraja itu. Dan surat kabar *Lasjkar*, sebagai pers yang moderat, segera menurunkan tajuknya untuk menanggapi peristiwa itu dengan menyatakan, “[...] sebagai warga negara Repoeblik Indonesia jang setia, kami pertjaja atas kebidjaksanaan pemerintah [...] moedah-moedahan jang [ber]wadajib segera dapat menjelesaikan perkara itoe, sehingga oedara lekas terang”.<sup>55</sup>

Namun udara politik di Solo, nampaknya, bukan lekas terang tetapi malah tambah mendung. Hasil-hasil perundingan antara Indonesia dengan Belanda masih gelap, dalam arti bahwa masyarakat luas tidak mendapatkan informasi yang jelas. Rumor politik bahwa Belanda hanya akan mengakui kemerdekaan Indonesia

---

<sup>53</sup>*Berita Repoeblik Indonesia* (Jakarta: 15 April 1946), hlm.110.

<sup>54</sup>Menurut pengakuan Aboe Bakar Loebis, dialah yang bersama-sama dengan pemuda Imam Slamet melakukan penangkapan terhadap Tan Malaka dan tokoh-tokoh oposisi lainnya di Madiun. Penangkapan itu dilakukan, sebenarnya, atas izin dari Sutan Sjahrir (Perdana Menteri) dan Dr. Soedarsono (Menteri Dalam Negeri); atas perintah dari Amir Sjarifoedin (Menteri Pertahanan); dan atas persetujuan (bahkan dibiayai dan diberi fasilitas kendaraan) dari Presiden Soekarno. Selanjutnya lihat Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku, dan Saksi* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.152-56.

<sup>55</sup>Tajuk “Penangkapan Politik di Solo” dalam *Lasjkar* (Solo: 25 Mei 1946), hlm.1.

ANDI SUWIRTA,  
*Bertempoer atau Beroending: Tanggapan Pers di Jawa pada Masa Awal  
Revolusi Indonesia*

secara de facto terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera semakin santer dan menjadi pembicaraan yang luas. Dalam hal ini surat kabar *Lasjkar* mengharapkan kepada pemerintah (terutama PM Sjahrir) untuk menolak hasil perundingan tersebut seandainya memang rumor politik itu benar. Sebagaimana diketahui bahwa perundingan-perundingan antara pihak Indonesia (diwakili oleh Sutan Sjahrir) dan pihak Belanda (diwakili oleh Van Mook) dari bulan April-Juni 1946 itu ditengahi oleh pihak Inggris (diwakili oleh Sir Archibald Clark Kerr). Dalam gambar karikatur yang disajikan oleh surat kabar *Lasjkar* di bawah ini sudah jelas bahwa seharusnya pemerintah menyatakan, "Tidak! Hanya 100% Merdeka untuk Indonesia seluruhnya", seandainya memang Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera saja.

Sumber:  
*Lasjkar* (Solo: 8 Mei 1946)

Dalam pada itu, kemelut politik di Solo semakin memanas dan menegangkan. Tindakan Menteri Pertahanan (Amir Sjarifoedin) yang memenjarakan tokoh-tokoh oposisi dan tindakan Menteri Dalam Negeri (Dr. Soedarsono) yang menangkap tokoh-tokoh gerakan anti swapraja, kini mendapat tantangan langsung dari pihak tentara. Di saat-saat rumor politik sedang santer beredar bahwa buah dari diplomasinya pemerintah dengan pihak Belanda itu - untuk sementara - hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera saja, serta akan diadakan reorganisasi tentara oleh Menteri Pertahanan, maka tidak hanya masyarakat saja yang resah, pihak tentara pun marah. Kemarahan tentara bisa menjadikan negara dalam keadaan bahaya.

Puncak dari kemarahan dan ketidakpuasan pihak tentara itu, misalnya, ditunjukkan dengan tindakannya yang membahayakan negara, yakni menculik PM Sutan Sjahrir yang kebetulan sedang berada di Solo pada tanggal 27 Juni 1946. Aksi-aksi penculikan sebagai manifestasi dari ketidakpuasan dan protes sosial acapkali terjadi pada masa revolusi. Dan akibat penculikan yang dilakukan oleh tentara terhadap PM (Perdana Menteri) itu, tentu saja, segera terjadi krisis kabinet dan negara dalam keadaan bahaya. Presiden Soekarno sendiri kemudian berpidato di depan radio, meminta masyarakat untuk tenang dan membebaskan Perdana Menteri. Presiden juga mengingatkan betapa bahayanya "musuh dari dalam" itu yang tidak bisa membedakan antara sikap oposisi dengan destruksi.<sup>56</sup> Pidato Presiden Soekarno ini ternyata efektif dan Sutan Sjahrir segera dibebaskan. Namun pihak tentara tidak tinggal diam. Bersama-sama dengan beberapa tokoh oposisi yang baru dibebaskannya dari penjara, mereka segera menghadap ke Istana pada tanggal 3 Juli 1946. Mereka meminta kepada Presiden Soekarno agar kabinet Sjahrir yang telah demisioner itu diganti saja dengan kabinet baru yang lebih revolusioner.

Presiden Soekarno ternyata menolak permintaan itu, bahkan menuduh bahwa gerakan itu sebagai kudeta terang-terangan. Mereka yang tergabung dalam pihak oposisi itu segera ditangkapi.

---

<sup>56</sup>John D. Legge, *Soekarno: Sebuah Biografi Politik*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm.254.

Dan razia politik pun dilanjutkan. Kali ini tidak hanya ditujukan kepada tokoh-tokoh politik, melainkan tokoh-tokoh pers juga terkena sasaran. Dalam kasus ini, tidak pelak lagi, bahwa pemihakan Presiden Soekarno (sebagai faktor integratif bangsa) yang tegas kepada pemerintah Sjahrir-Amir Sjarifoedin merupakan kemenangan besar bagi dilanjutkannya politik diplomasi. Sebaliknya, hal itu merupakan kekalahan telak bagi pihak oposisi yang menghendaki jalan pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan.<sup>57</sup> Itulah, barangkali, salah satu implikasi dari Peristiwa 3 Juli 1946.

Akibat situasi politik yang gawat itu, surat kabar *Lasjkar* di Solo tidak terbit sejak tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 1946. Dan ketika terbit kembali pada tanggal 5 Juli 1946, surat kabar ini segera menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pihak oposisi dengan menyatakan: “*Sembojan jang hebat-hebat sering boeahnja tidak akan menginsjafkan orang, tetapi malah menjebakkan orang silau dan [tak] tahoe kenjataan lagi*”.<sup>58</sup> Sementara itu keberpihakan surat kabar *Lasjkar* kepada pemerintah, nampak dari pernyataan: “*Seloeroeh rakjat Soerakarta ta’at dan toendoek sepenoeh-penoehnja kepada Presiden*”.<sup>59</sup> Akhirnya, ketika pemerintah mendakwa bahwa dalang di balik “Peristiwa 3 Juli” yang menghebohkan itu adalah Tan Malaka dan kawan-kawannya, kembali surat kabar *Lasjkar* di Solo memberikan pernyataan sebagai berikut:

NICA asjik mentjatoet daerah Indonesia, djanganlah kita asjik tjatoet-mentjatoet dalam kalangan sendiri. Tjatoetlah NICA !

MENTJATOET Nica berarti mengoesahakan pengakoean *de facto* dan *de jure* atas Repoeblik Indonesia. Tapi mentjatoet dalam kalangan sendiri, berarti merobohkan Repoeblik Indonesia !<sup>60</sup>

Sebenarnya, sebelum peristiwa 3 Juli itu terjadi, surat kabar *Lasjkar* sudah memperingatkan kepada para elite politik Indonesia

---

<sup>57</sup>Anderson, 1988, *Revoloesi*, hlm.439.

<sup>58</sup>Motto *Lasjkar* (Solo: 5 Juli 1946), hlm.1.

<sup>59</sup>Motto *Lasjkar* (Solo: 6 Juli 1946), hlm.1.

<sup>60</sup>Motto *Lasjkar* (Solo: 8 Juli 1946), hlm.1.

untuk tidak saling mencatut, karena hal itu hanya akan merugikan “kita” dan menguntungkan “mereka” (Belanda). Karikatur berikut ini, barangkali, merupakan peringatan yang jelas dari surat kabar Lasjkar di Solo.

Sumber:  
*Lasjkar* (Solo: 9 Mei 1946)

## **Penutup**

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa pers pada masa awal revolusi di Indonesia memiliki hak mengekspresikan dirinya secara sangat bebas. Dihadapkan pada isyu politik nasional tentang pilihan “*bertempoer*” atau “*beroending*” dalam mempertahankan

kemerdekaan, pers mampu menyuarakan pandangan, sikap, dan pendiriannya dalam bahasa yang lugas, tegas, terus terang, dan bahkan ada yang vulgar. Dengan demikian maka pro-kontra, simpati-antipati, atau sikap moderat-radikal dari pers – sebagaimana ditunjukkan juga oleh kelompok masyarakat lainnya, termasuk tentara – dalam menanggapi suatu persoalan yang dinilai penting pada masa revolusi merupakan dinamika internal, sebagai bagian dari proses demokratisasi.

Dalam derajat tertentu pemerintah membiarkan dan bahkan mendorong ekspresi-ekspresi kemerdekaan sebagai manifestasi dari nilai-nilai dan semangat revolusi itu. Namun ketika kemerdekaan berekspresi, termasuk juga aksi-aksi revolusioner, dipandang membahayakan keselamatan negara, maka tindakan pembatasan dan penangkapan pun segera dilakukan oleh pemerintah. Pers, masyarakat, pemerintah, dan juga tentara banyak belajar dari pengalaman revolusi bahwa kemerdekaan adalah nilai-nilai yang berguna dan berharga. Namun dalam tataran implementasi perlu dibatasi sesuai dengan kesepakatan sosial dan kepentingan politik bersama. Betapapun dalam prakteknya, kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa jelas lebih dominan daripada kepentingan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ben. (1988). *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Caniago, JR. *et al.*. (1987). *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka, 1945-1985*. Jakarta: Pustaka Merdeka.
- Dewantara, Ki Hajar. (1946). "Arti Kata Kemerdekaan" dalam *Lasjkar*. Solo: 1 Pebruari.
- Djoyoadisuryo, Ahmad Subardjo. (1978). *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Gunung Agung.

- Ghazali, Zulfikar [ed.]. (1995). *Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi*. Jakarta: Proyek IDSN Depdikbud.
- Hendrowinoto, Nurinwa Ki S.. (1985). *A. Azis Wartawan Kita*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kahin, George McTurnan. (1970). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York, Ithaca: Cornell University Press.
- Kratz, Ulrich. (1986). "Peranan Pers dalam Revolusi" dalam Collin Wild dan Peter Carey [eds.]. *Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Legge, John D.. (1985). *Soekarno: Sebuah Biografi Politik*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Loebis, Aboe Bakar. (1992). *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku, dan Saksi*. Jakarta: UI Press.
- Lubis, Mochtar. (1992). *Jalan Tak Ada Ujung*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lucas, Anton E.. (1989). *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*. Terjemahan. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Mrazek, Rudolf. (1994). *Semesta Tan Malaka*. Terjemahan. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Said, Salim. (1992). *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics, 1945-49*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Wartini. (1984). *Katalog Surat Kabar Koleksi Perpustakaan Nasional 1810-1984*. Jakarta: Perpustakaan-Depdikbud RI.
- Sjahir, Sutan. (1968). *Our Struggle*. Terjemahan dan Kata Pengantar oleh Benedict R.O'G. Anderson. New York, Ithaca: Cornell University.
- Suwirta, Andi. (2000). *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), 1945-1947*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Williams, Michael C.. (1990). "Utang Padi Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah" dalam Audrey Kahin [ed.]. *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Terjemahan. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Zuhdi, Susanto. (1992). "Perjanjian Linggarjati Dilihat oleh Beberapa Surat Kabar Lokal di Jawa" dalam A.B. Lopian & P.J. Drooglever [eds.]. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: PT Grafiti Pers.

## Suratkabar:

- Berita Indonesia*. Jakarta: 10 Januari 1946.  
*Berita Indonesia*. Jakarta: 16 Pebruari 1946.

ANDI SUWIRTA,  
*Bertempoer atau Beroending: Tanggapan Pers di Jawa pada Masa Awal  
Revolusi Indonesia*

- Berita "Berita Tata Oesaha" dalam *Lasjkar*. Solo: 1 Desember 1945.
- Berita "Kabinet baroe tidak kenal kompromi" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 16 Nopember 1945.
- Berita "Makloemat Kepada Rakjat" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 7 Oktober 1945.
- Berita Repoeblik Indonesia*. Jakarta: 15 April 1946.
- Berita "Permoesjawaratan Persatoean Perdjoengan, Hari Kedoea" dalam *Lasjkar*. Solo: 30 Januari 1946.
- Berita "Persatoean Perdjoengan Tidak Iri Bereboet Koersi" dalam *Lasjkar*. Solo: 30 Januari 1946.
- Berita "TAN MALACCA, Bapak Republik Indonesia" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 26 Desember 1945.
- Berita "Warta Administrasi" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 20 Oktober 1945.
- Lasjkar*. Solo: 27 Pebruari 1946.
- Motto *Lasjkar*. Solo: 1 Desember 1945.
- Motto *Lasjkar*. Solo: 5 Juli 1946.
- Motto *Lasjkar*. Solo: 6 Juli 1946.
- Motto *Lasjkar*. Solo: 8 Juli 1946.
- Motto *Warta Indonesia*. Semarang: 29 September 1945.
- Opini "Kearah Indonesia Baroe" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 14 Nopember 1945.
- Opini "Lenjaplah Birokrasi Djepang" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 14 November 1945.
- Opini "Masalah Kebangsaan Kita" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: No.3.
- Opini "Perdjoengan Kita" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: No.1.
- Opini "Pikiran dan Semangat" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 16 Desember 1945.
- Pojok *Berita Indonesia*. Jakarta: No.2.
- Pojok *Berita Indonesia*. Jakarta: 30 Oktober 1945.
- Pojok *Berita Indonesia*. Jakarta: 11 Januari 1946.
- Pojok "Kata Nabi Moehammad S.A.W." dalam *Warta Indonesia*. Semarang: 10 Nopember 1945.
- Pojok "Lain doeloe lain sekarang" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 10 Oktober 1945.
- Pojok *Lasjkar*. Solo: 12 dan 19 Januari 1946.
- Pojok *Lasjkar*. Solo: 14 Maret 1946.
- Pojok "Mbok ja ... Bersatoe" dalam *Lasjkar*. Solo: 9 Maret 1946.
- Pojok "Pinggir Garis: Malem Minggon" dalam *Lasjkar*. Solo: 26 Januari 1946.

- Tajuk "Dekrit Presiden Kita" dalam *Warta Indonesia*. Semarang: 29 September 1945.
- Tajuk "Dengan Belanda Tidak Ada Peroendingan" dalam *Warta Indonesia*. Semarang: 30 Oktober 1945.
- Tajuk "Diplomasi Kita" dalam *Warta Indonesia*. Semarang: 1 Oktober 1945.
- Tajuk "Hanja satoe djalan ... BERPERANG !" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 7 Oktober 1945.
- Tajuk "Kabinet Baroe" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 13 Nopember 1945.
- Tajuk "Kedaulatan Rakjat" dalam *Lasjkar*. Solo: 26 Desember 1945.
- Tajuk "Kemenangan Kita" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 1 Desember 1945.
- Tajuk "Kenjataan" dalam *Warta Indonesia*. Semarang: 26 Oktober 1945.
- Tajuk "Memperkenalkan Diri" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: No.1.
- Tajuk "Penangkapan Politik di Solo" dalam *Lasjkar*. Solo: 25 Mei 1946.
- Tajuk "Politik Republik Indonesia" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: No.2.
- Tajuk "Rakjat Moerba Menoentoet !" dalam *Berita Indonesia*. Jakarta: 27 Desember 1945.
- Warta Indonesia*. Semarang: 2 Nopember 1945.

ANDI SUWIRTA,  
*Bertempoer atau Beroending: Tanggapan Pers di Jawa pada Masa Awal  
Revolusi Indonesia*

*Salah satu isu politik penting pada masa awal revolusi Indonesia adalah apakah usaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu akan dilakukan dengan cara bertempur atau berunding. Pers, dalam hal ini surat kabar, dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya – termasuk militer – turut melibatkan diri dalam perdebatan itu sehingga menjadikan revolusi Indonesia mengalami konflik internal yang dinamis. Betapapun pemerintah RI akhirnya bersikukuh bahwa jalan diplomasi adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan revolusi, namun keinginan-keinginan untuk memilih jalan pertempuran merupakan ekspresi kehidupan demokrasi di Indonesia. Kata-kata kunci: pilihan bertempur atau berunding, dinamika internal revolusi, dan kebebasan berdemokrasi di Indonesia.*